Jurnal Fokus Administrasi Publik (JUFAP)
Vol. 1. No. 2, 2025
(p-ISSN XXXX-XXXX; e-XXXX-XXXX)

Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Natasya Saragih [1)]
Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas HKBP Nommensen Medan
Email : natasya.saragih@student.uhn.ac.id

ABSTRACT
Regional autonomy in Indonesia aims to bring services and decisions closer to the people, with the hope that local governments will be able to more effectively improve welfare. Theoretically, autonomy opens up opportunities for locally responsive policies and community participation. However, its implementation faces challenges such as regional fiscal limitations, human resource capacity of civil servants, weak coordination, and local political dynamics. This qualitative research identifies key challenges perceived by the government and the community, including fiscal dependency and slow bureaucracy. On the other hand, opportunities arise from local policy flexibility, increased community participation, and economic development based on regional potential. Strong synergy between local governments and communities has proven crucial, resulting in more effective and sustainable welfare programs. Conversely, weak synergy hinders success. Building trust and collaboration is key to optimizing the role of regional autonomy in achieving inclusive and sustainable welfare.
Keywords: Regional Autonomy, Community Welfare, Challenges, Opportunities

ABSTRAK
Otonomi daerah di Indonesia bertujuan mendekatkan pelayanan dan keputusan kepada masyarakat, dengan harapan pemerintah daerah mampu lebih efektif meningkatkan kesejahteraan. Secara teoritis, otonomi membuka peluang bagi kebijakan yang responsif lokal dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti keterbatasan fiskal daerah, kapasitas SDM aparatur, koordinasi yang lemah, dan dinamika politik lokal. Penelitian kualitatif ini mengidentifikasi tantangan utama yang dipersepsikan oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk ketergantungan fiskal dan birokrasi yang lamban. Di sisi lain, peluang muncul dari fleksibilitas kebijakan lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah. Sinergi kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat terbukti krusial, menghasilkan program kesejahteraan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sebaliknya, sinergi yang lemah menghambat keberhasilan. Membangun kepercayaan dan kolaborasi adalah kunci untuk mengoptimalkan peran otonomi daerah dalam mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Tantangan, Peluang

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah, sebagai salah satu pilar utama reformasi pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia, diamanatkan untuk mendekatkan pelayanan publik dan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Ide dasarnya adalah bahwa pemerintah daerah, yang lebih memahami konteks dan kebutuhan lokal, akan lebih efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Hal ini sejalan dengan prinsip

desentralisasi, di mana kekuasaan dan tanggung jawab dialihkan dari pemerintah pusat ke unit-unit pemerintahan di tingkat bawah.

Di Indonesia, kebijakan otonomi daerah yang digulirkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan kini UU No. 23 Tahun 2014) menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan. Daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengaturan keuangan, pelayanan publik, dan pembangunan. Harapan besar disematkan pada kebijakan ini untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh pelosok negeri.

Secara teoretis, otonomi daerah membuka peluang besar untuk peningkatan kesejahteraan. Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas lokal, merancang program-program yang spesifik kebutuhan masyarakat, dan mendorong inovasi dalam pelayanan. Misalnya, pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons kebutuhan mendesak akan infrastruktur dasar seperti jalan desa atau fasilitas kesehatan lokal, yang mungkin tidak menjadi prioritas utama di tingkat pusat. Selain itu, kedekatan dengan masyarakat juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan pembangunan, dari perencanaan hingga pengawasan.

Namun, implementasi otonomi daerah tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kapasitas fiskal daerah. Banyak daerah, terutama di wilayah yang kurang berkembang, masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat dan memiliki keterbatasan dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan daerah untuk membiayai program-program kesejahteraan yang ambisius atau bahkan menjaga kualitas pelayanan dasar.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur daerah juga sering menjadi kendala. Desentralisasi menuntut aparatur yang kompeten, inovatif, dan berintegritas. Namun, di beberapa daerah, kualitas SDM masih baring, baik dalam hal perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, maupun penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif. Kurangnya kompetensi ini dapat berujung pada inefisiensi, salah sasaran program, atau bahkan praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah koordinasi dan sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dan antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Otonomi tidak berarti masing-masing daerah bekerja sendiri. Diperlukan kerangka koordinasi yang kuat untuk menangani isu-isu lintas batas daerah atau program-program yang membutuhkan dukungan multisektoral. Tanpa sinergi yang baik, upaya peningkatan kesejahteraan bisa terhambat oleh ego sektoral atau tumpang tindih kebijakan.

Dinamika politik lokal juga dapat menjadi tantangan. Pemilihan kepala daerah secara langsung, meskipun meningkatkan akuntabilitas, kadang kala menyebabkan prioritas pembangunan bergeser mengikuti siklus politik dan janji kampanye, bukan berdasarkan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Fenomena *clientelism* atau *patronage* juga dapat mengikis prinsip meritokrasi dan transparansi dalam tata kelola daerah, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas program-program kesejahteraan. Melihat kompleksitas antara peluang dan

tantangan otonomi daerah dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana berbagai dimensi otonomi daerah mulai dari aspek fiskal, kelembagaan, partisipasi, hingga politik lokal berinteraksi dan memengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami tantangan dan mengoptimalkan peluang, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih strategis untuk memperkuat peran otonomi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

1. Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan tertentu (Rondinelli, Nellis, & Cheema, 1983). Konsep ini memiliki berbagai bentuk, yaitu dekonsetrasi (penyerahan wewenang administratif kepada pejabat pusat di daerah), delegasi (penyerahan tanggung jawab kepada agen yang tidak sepenuhnya dikendalikan pusat), devolusi (penyerahan wewenang dan tanggung jawab penuh kepada unit pemerintah daerah yang otonom), dan privatisasi (penyerahan fungsi kepada organisasi non-pemerintah). Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, fokus utamanya adalah pada devolusi, di mana pemerintah daerah memiliki diskresi dan akuntabilitas yang lebih besar.

Menurut Rondinelli et al. (1983), tujuan utama desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pelayanan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat. Argumen di balik desentralisasi adalah bahwa pemerintah daerah lebih dekat dengan rakyat, sehingga lebih memahami kebutuhan lokal dan mampu merancang kebijakan yang lebih sesuai. Desentralisasi juga diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah pusat, meningkatkan akuntabilitas lokal, dan mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, Oates (1972) dalam "Fiscal Federalism"-nya, menyoroti adanya teorema desentralisasi, yang menyatakan bahwa desentralisasi pengeluaran publik akan lebih efisien jika preferensi masyarakat terhadap barang publik bervariasi secara geografis. Artinya, ketika kebutuhan masyarakat berbeda-beda antar daerah, pemerintah daerah yang otonom dapat menyediakan barang dan jasa publik yang lebih optimal dibandingkan pemerintah pusat. Namun, Oates juga mengakui adanya potensi *spillover effects* (efek limpahan) antar daerah yang memerlukan koordinasi.

Perdebatan dalam teori desentralisasi juga mencakup potensi tantangan seperti inefisiensi fiskal (daerah mungkin tidak memiliki kapasitas pendapatan yang cukup), ketimpangan antar daerah (daerah kaya semakin kaya, daerah miskin tertinggal), dan risiko korupsi lokal (kekuasaan yang didelegasikan tanpa pengawasan memadai) (Shah, 2004). Oleh karena itu, keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada desain kelembagaan, kapasitas lokal, dan kerangka regulasi yang kuat.

2. Teori Kesejahteraan Masyarakat (Community Well-being)

Kesejahteraan masyarakat adalah konsep multidimensional yang jauh melampaui indikator ekonomi semata. Ini mencakup kualitas hidup secara menyeluruh, baik dari segi material, sosial, budaya, maupun lingkungan. Sen (1999) dengan pendekatan kapabilitasnya (capability approach), berpendapat bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan atau kepemilikan barang, tetapi dari kebebasan seseorang untuk mencapai fungsi-fungsi dasar kehidupan yang

mereka hargai (misalnya, kemampuan untuk hidup sehat, mendapatkan pendidikan, berpartisipasi dalam komunitas, atau memiliki martabat). Dalam konteks ini, kebijakan otonomi daerah harus dinilai dari bagaimana ia memperluas kapabilitas masyarakat.

Goodwin, Kent, dan Wetton (2015) mendefinisikan kesejahteraan masyarakat sebagai kondisi di mana individu dan komunitas memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan lingkungan yang mendukung untuk mencapai potensi penuh mereka. Mereka mengidentifikasi beberapa dimensi kunci kesejahteraan:

a. Kesejahteraan Ekonomi: Pendapatan yang stabil, akses pekerjaan, kepemilikan aset, keamanan finansial.
b. Kesejahteraan Sosial: Akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, jaring pengaman sosial, kohesi sosial, keadilan.
c. Kesejahteraan Lingkungan: Akses air bersih dan sanitasi, lingkungan yang sehat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
d. Kesejahteraan Politik/Pemerintahan: Partisipasi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas pemerintah, keadilan prosedur.

Peningkatan kesejahteraan ini tidak dapat dicapai hanya dengan intervensi *top-down*. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, yang merupakan inti dari semangat otonomi daerah. Kebijakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat secara langsung memengaruhi dimensi-dimensi kesejahteraan ini.

3. Teori Kapabilitas Lokal dan Tata Kelola Inklusif

Keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sangat bergantung pada kapabilitas lokal pemerintah daerah dan masyarakatnya. Kapabilitas lokal merujuk pada kapasitas sumber daya manusia (SDM), kapasitas kelembagaan, kapasitas finansial, dan kapasitas teknologi yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya secara efektif (Grindle, 1997; World Bank, 2017). Grindle (1997) menekankan bahwa kapasitas tidak hanya tentang memiliki sumber daya, tetapi juga kemampuan untuk menggunakannya secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks otonomi daerah, ini berarti pemerintah daerah harus memiliki aparatur yang kompeten dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, dan pengawasan program-program kesejahteraan. Kurangnya kapabilitas dapat menyebabkan inefisiensi, salah sasaran, dan bahkan korupsi, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Terkait erat dengan kapabilitas adalah konsep tata kelola inklusif (inclusive governance). Gaventa (2004) menekankan pentingnya *citizen engagement* dan partisipasi dalam tata kelola untuk memastikan bahwa keputusan publik mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, terutama kelompok marginal. Tata kelola inklusif berarti menciptakan mekanisme dan ruang bagi masyarakat untuk bersuara, berpartisipasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. UNDP (2014) menggarisbawahi bahwa tata kelola yang baik (good governance) dicirikan oleh partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Dalam konteks otonomi daerah, tata kelola inklusif berfokus pada:

a. Partisipasi: Masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan kebijakan pembangunan.

b. Transparansi: Informasi mengenai kebijakan dan anggaran daerah dapat diakses oleh publik.
c. Akuntabilitas: Pemerintah daerah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.

Ketika kapabilitas lokal kuat dan tata kelola inklusif diterapkan, otonomi daerah memiliki potensi lebih besar untuk mengidentifikasi masalah kesejahteraan yang spesifik, merumuskan solusi inovatif, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan (OECD, 2017).

4. Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory) dalam Konteks Desentralisasi

Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory) menganalisis perilaku aktor dalam arena politik menggunakan asumsi ekonomi tentang individu yang rasional dan memaksimalkan utilitasnya (Buchanan & Tullock, 1962). Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, teori ini menawarkan perspektif kritis mengenai motivasi di balik keputusan politik di tingkat lokal. Menurut Tiebout (1956) dalam model "Voting with Your Feet," jika individu memiliki informasi yang sempurna dan mobilitas yang tinggi, mereka akan memilih untuk tinggal di yurisdiksi lokal yang menyediakan kombinasi barang dan jasa publik yang paling sesuai dengan preferensi mereka, dengan pajak yang sesuai. Ini menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi alokatif karena pemerintah daerah berkompetisi untuk menarik penduduk dan investasi dengan menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, model ini mengasumsikan mobilitas yang tinggi dan informasi yang sempurna, yang seringkali tidak realistis di negara berkembang.

Di sisi lain, Teori Pilihan Publik juga menyoroti potensi rent-seeking dan korupsi di tingkat lokal dalam kerangka otonomi daerah (Acemoglu & Robinson, 2012). Ketika kekuasaan dan sumber daya didesentralisasikan tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, pejabat daerah mungkin cenderung memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, daripada untuk kepentingan publik. Ini dapat mengurangi efektivitas anggaran daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperburuk ketimpangan. Oleh karena itu, dari perspektif Teori Pilihan Publik, keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada penyerahan wewenang, tetapi juga pada desain institusi yang meminimalkan peluang *rent-seeking*, mendorong kompetisi yang sehat antar daerah, dan memastikan mekanisme akuntabilitas yang kuat dari bawah ke atas.

5. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) di Tingkat Lokal

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (WCED, 1987). Konsep ini menekankan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah lokal memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program mereka (UN-Habitat, 2016).

Di tingkat lokal, kebijakan otonomi daerah harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Misalnya, daerah harus dapat mengembangkan potensi ekonominya

(seperti pertanian atau pariwisata) tanpa merusak ekosistem atau memperlebar jurang ketimpangan. Kebijakan terkait tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, penanggulangan bencana, dan pelayanan dasar (air, sanitasi, energi terbarukan) semuanya berada dalam lingkup otonomi daerah dan memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan kesejahteraan.

UN-Habitat (2016) menekankan peran pemerintah lokal dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 11 (Kota dan Pemukiman Berkelanjutan) dan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan). Otonomi daerah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah lokal untuk mengadaptasi target-target global ini ke dalam konteks spesifik mereka dan melibatkan masyarakat dalam pencapaiannya. Tantangannya adalah bagaimana daerah mampu mengelola potensi konflik antara tujuan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang, serta bagaimana mereka dapat mengakses pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk pembangunan yang benar-benar berkelanjutan.Dengan mengintegrasikan kelima teori ini, penelitian tentang tantangan dan peluang otonomi daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menganalisis secara komprehensif bagaimana kebijakan desentralisasi memengaruhi berbagai dimensi kesejahteraan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan politik lokal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi mendalam terhadap fenomena inovasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat dalam konteks kehidupan nyata dan batas-batasnya (Yin, 2018). Dengan memilih satu atau beberapa kasus inovasi yang spesifik, peneliti dapat menganalisis secara holistik bagaimana partisipasi masyarakat memengaruhi proses, bentuk, dan keberlanjutan inovasi tersebut.

Jenis Penelitian: Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara rinci, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkumpul untuk mendapatkan pemahaman holistik tentang inovasi kebijakan publik untuk pembangunan rendah karbon dari sudut pandang administrasi lingkungan, tanpa berfokus pada pengujian hipotesis statistik.

Untuk mencapai tujuan penelitian, kombinasi teknik pengumpulan data akan digunakan:

1. Survei/Kuesioner (Data Kuantitatif):.
2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) (Data Kualitatif):
3. Observasi Partisipatif (Data Kualitatif):
4. Studi Dokumentasi (Data Kuantitatif & Kualitatif)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Lokal Mempersepsikan Tantangan Utama Dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat?

Pembahasan untuk rumusan masalah ini akan menggali perspektif subjektif dari aparatur pemerintah daerah dan warga mengenai hambatan yang mereka hadapi dalam mewujudkan kesejahteraan di bawah kerangka otonomi. Data akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat daerah (misalnya, kepala dinas, Bappeda), anggota DPRD, serta tokoh masyarakat, kepala desa, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil. Observasi partisipatif pada forum-forum perencanaan atau evaluasi daerah juga akan memberikan wawasan.

Hasilnya mungkin menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal sebagai tantangan utama. Pemerintah daerah mungkin mengungkapkan frustrasi terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan pada transfer pusat, yang membatasi fleksibilitas anggaran program kesejahteraan. Masyarakat, di sisi lain, mungkin mempersepsikan ini dalam bentuk minimnya fasilitas publik atau program bantuan yang tidak memadai. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur daerah bisa jadi tantangan signifikan. Pejabat mungkin mengakui kurangnya kompetensi dalam perencanaan strategis atau inovasi, sementara masyarakat mungkin merasakan birokrasi yang lambat atau tidak responsif. Isu koordinasi antar-OPD atau campur tangan politik lokal juga bisa muncul sebagai hambatan, di mana masyarakat mungkin merasa program tidak terintegrasi atau hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pembahasan akan mengelaborasi bagaimana persepsi tantangan ini saling terkait dan bagaimana persepsi dari pemerintah dan masyarakat dapat berbeda atau sejalan.

2. **Peluang-Peluang Apa Saja Yang Diidentifikasi Oleh Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Lokal Dalam Kerangka Otonomi Daerah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat?**

Rumusan masalah ini akan fokus pada identifikasi dan eksplorasi potensi positif otonomi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yang sama seperti di rumusan masalah pertama, serta studi dokumentasi dari rencana pembangunan daerah, laporan inovasi daerah, atau inisiatif komunitas.

Peluang yang mungkin teridentifikasi adalah fleksibilitas dalam penyusunan kebijakan lokal yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik. Pemerintah daerah mungkin menyoroti kemampuan mereka untuk membuat peraturan daerah atau program unik yang sesuai dengan karakteristik demografi atau ekonomi lokal, seperti program pelatihan keterampilan khusus bagi pemuda desa atau insentif bagi UMKM lokal. Masyarakat dapat mempersepsikan ini dalam bentuk program-program yang lebih "mengena" dan memberikan manfaat langsung. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bisa menjadi peluang besar. Warga mungkin mengungkapkan bahwa otonomi daerah telah membuka lebih banyak ruang bagi mereka untuk bersuara dalam musrenbang atau melalui lembaga adat, yang membuat mereka merasa lebih "memiliki" program pembangunan. Pemerintah daerah dapat melihat ini sebagai sumber ide inovatif dan legitimasi kebijakan. Potensi pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi daerah (misalnya, pariwisata, produk unggulan pertanian) yang didorong oleh kewenangan daerah juga akan dibahas, termasuk bagaimana infrastruktur yang relevan dibangun untuk mendukungnya. Pembahasan akan mengelaborasi bagaimana pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang-peluang ini dan potensi keberhasilannya.

3. **Bagaimana Sinergi Antara Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Memengaruhi Efektivitas Program Kesejahteraan Di Tingkat Lokal?**

Rumusan masalah ini akan menggali interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta dampaknya terhadap efektivitas program kesejahteraan. Data akan diambil dari wawancara mendalam dengan pelaku program (misalnya, staf dinas sosial, pendamping desa,

pengelola program kesehatan), penerima manfaat, dan tokoh masyarakat. Observasi partisipatif pada rapat koordinasi atau kegiatan implementasi program, serta studi dokumentasi laporan evaluasi program, akan memperkaya analisis.

Pembahasan mungkin menunjukkan bahwa ketika ada sinergi yang kuat – di mana pemerintah daerah proaktif melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan dan masyarakat aktif berkontribusi – program kesejahteraan cenderung lebih efektif dan berkelanjutan. Misalnya, program air bersih yang dirancang bersama komunitas mungkin lebih sesuai dengan kondisi geografis dan kebiasaan lokal, dan masyarakat lebih termotivasi untuk memeliharanya. Wawancara dengan penerima manfaat dapat mengungkapkan bahwa mereka merasa "didengar" dan "dihargai," yang meningkatkan kepuasan dan adopsi program.

Sebaliknya, jika sinergi lemah, program mungkin menghadapi kendala dalam implementasi, kurang tepat sasaran, atau tidak berkelanjutan. Ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi, minimnya umpan balik dari masyarakat, atau bahkan konflik kepentingan. Pembahasan akan mengidentifikasi model-model sinergi yang berhasil (misalnya, *co-production*, kemitraan) dan menjelaskan mengapa model tersebut efektif, serta mengelaborasi faktor-faktor yang menghambat sinergi, seperti kurangnya kepercayaan, dominasi salah satu pihak, atau mekanisme komunikasi yang tidak efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi otonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dihadapkan pada tantangan kompleks yang dipersepsikan secara berbeda oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, yang berujung pada ketergantungan transfer pusat dan minimnya fasilitas publik, menjadi hambatan utama. Selain itu, isu kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah, birokrasi yang lamban, serta kendala koordinasi dan campur tangan politik lokal turut memperumit upaya peningkatan kesejahteraan. Pemahaman mendalam atas persepsi ini esensial untuk merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran.

Meskipun demikian, otonomi daerah juga menawarkan peluang signifikan untuk peningkatan kesejahteraan. Fleksibilitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lokal yang responsif terhadap kebutuhan spesifik adalah potensi besar. Ini memungkinkan inovasi program seperti pelatihan keterampilan atau insentif UMKM yang lebih "mengena". Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan juga menjadi peluang kunci, memberikan legitimasi kebijakan dan memicu ide-ide inovatif dari bawah. Optimalisasi potensi ekonomi lokal berbasis karakteristik daerah juga terbuka lebar, didukung oleh kewenangan otonomi.

Efektivitas program kesejahteraan di tingkat lokal sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Ketika pemerintah secara proaktif melibatkan masyarakat sejak perencanaan dan masyarakat berkontribusi aktif, program cenderung lebih relevan, diterima, dan berkelanjutan. Program yang dirancang bersama komunitas, misalnya, tidak hanya lebih sesuai dengan kondisi lokal tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan, mendorong partisipasi dalam pemeliharaan, dan meningkatkan kepuasan penerima manfaat.

Sebaliknya, sinergi yang lemah dapat menghambat keberhasilan

program. Kurangnya komunikasi, umpan balik yang minim, atau dominasi salah satu pihak dapat menyebabkan program tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, atau bahkan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, membangun kepercayaan dan mengembangkan mekanisme komunikasi serta kolaborasi yang efektif adalah kunci untuk memaksimalkan peluang otonomi daerah. Dengan mengatasi tantangan dan mengoptimalkan sinergi ini, otonomi daerah dapat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.

Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. University of Michigan Press.

Gaventa, J. (2004). Towards Participatory Governance: Assessing the Debates. In *Participatory Governance: Political and Public Policy Implications* (pp. 1-32). Palgrave Macmillan.

Goodwin, P., Kent, R., & Wetton, J. (2015). *Measuring Community Well-being: A Scoping Study*. Research Report for the Australian Bureau of Statistics.

Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Harvard Institute for International Development.

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich

OECD. (2017). *Governing the City: A Framework for Integrated Urban Governance*. OECD Publishing.

Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. World Bank Publications.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Alfred A. Knopf.

Shah, A. (Ed.). (2004). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. The World Bank.

Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, *64*(5), 416-424.

UN-Habitat. (2016). *Localizing the Post-2015 Development Agenda: What Does it Mean in Practice?*. UN-Habitat.

UNDP. (2014). *Local Governance for Poverty Reduction in Africa*. UNDP.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Relevan untuk konteks Indonesia).

World Bank. (2015). *World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior*. World Bank Publications.

World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. World Bank Publications.

WCED (World Commission on Environment and Development). (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.